

Penentuan Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Analisis Interaksi Spasial Antarwilayah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Imambang Eka Sulistya

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

(UPBJJ-UT 71 Surabaya), Indonesia

Diterima: 23 Januari, 2025 | Revisi: 5 Februari, 2025 | Diterbitkan: 31 Maret, 2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini guna menentukan pusat pertumbuhan ekonomi dan menganalisis interaksi spasial antarwilayah di DIY, serta merumuskan strategi untuk mengentaskan kemiskinan dan penyelarasan disparitas ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis spasial secara komprehensif terkait interaksi antarwilayah DIY, serta peran kota maupun daerah hinterland dalam distribusi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan meliputi Analisis Interaksi (Model Gravitasi), Analisis Skalogram, Indeks Sentralitas, Analisis Location Quotient, serta Tipologi Klassen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DIY mempunyai struktur wilayah hierarkis, dengan Kota Yogyakarta sebagai pusat utama, diikuti Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul. Berdasarkan temuan ini, disarankan untuk meningkatkan infrastruktur di wilayah hinterland, memperkuat sektor unggulan, mendorong kawasan industri di luar Kota Yogyakarta, dan mengintegrasikan perencanaan tata ruang dengan kebijakan pembangunan ekonomi guna mendukung pemerataan dan pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Interaksi Spasial, Pengentasan Kemiskinan, Penyelarasan Disparitas, Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Unggulan.

Determining the Growth Pole of Economic and Analysis of Interregional Spatial Interactions in the Special Region of Yogyakarta Province

ABSTRACT

This research aims to analyze economic growth and spatial interactions among regions in the Special Region of Yogyakarta, and to formulate strategies to reduce poverty and economic disparities. The novelty lies in a comprehensive spatial analysis related to the interaction between Special Region of Yogyakarta Province regions, as well as the role of cities and hinterland areas in resource distribution and economic growth. The methods used include Interaction Analysis (Gravity Model), Scalogram Analysis, Centrality Index, Location Quotient Analysis, and Klassen Typology. The results show that Special Region of Yogyakarta Province has a hierarchical regional structure, with Yogyakarta City as the main center, followed by Sleman, Bantul, Kulonprogo, and Gunungkidul. Based on these findings, it is recommended to improve infrastructure in hinterland areas, strengthen base sectors, encourage industrial estates outside the city of Yogyakarta, and integrate spatial planning with economic development policies to support equitable distribution and sustainable regional growth.

Keywords: Spatial Interaction, Poverty Alleviation, Alignment of Disparity, Center for Economic Growth, Leading Sectors.

*Corresponding Author:

Email : sulistya125@gmail.com

Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Terbuka (UPBJJ-UT 71 Surabaya).



This article is published under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi adalah upaya multidimensi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan total, mendorong aktivitas ekonomi, serta menghasilkan barang dan jasa yang diukur melalui PDRB, dengan penduduk sebagai subjek pembangunan yang memengaruhi arah perekonomian, serta bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat (Arsyad, 2016; Emalia & Farida, 2018; Rohmah & Fitrianto, 2024). Keberhasilan pembangunan ekonomi ditandai oleh tiga aspek utama: peningkatan harga diri masyarakat, pemenuhan kebutuhan pokok, dan kebebasan memilih sebagai hak asasi manusia (Todaro & Smith, 2003 dalam Arsyad, 2016). Dalam rangka mewujudkan hasil pembangunan ekonomi yang baik dan optimal, maka dibutuhkan sumber daya manusia handal dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang matang. SPPN merupakan prosedur terintegrasi untuk merancang rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat (UU Nomor 25, 2004) Perencanaan pembangunan merupakan sarana untuk menerapkan strategi ekonomi melalui program terkoordinasi guna mengoptimalkan sumber daya publik dan swasta demi pertumbuhan ekonomi daerah (Gulo, 2015). Salah satu tujuan perencanaan pembangunan ekonomi adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan elemen penting mencakup pemilihan alternatif, alokasi sumber daya, pencapaian tujuan, dan orientasi masa depan (Arsyad, 2016; Rahajeng, 2016).

Perencanaan yang efektif berperan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesempatan dan distribusi hasil pembangunan, dengan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama pencapaian target pembangunan suatu negara (Fudhail et al., 2021; Imelda, 2013; Yuliarni & Astuti, 2024) Pemerintah terus berupaya mencapai keseimbangan antara pembangunan nasional dan daerah untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran, mengingat peran penting pembangunan daerah dalam mendukung kesuksesan pembangunan nasional (Devi et al., 2023). Pembangunan daerah adalah proses pengelolaan sumber daya oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan peluang kerja dan mempercepat perkembangan ekonomi, yang dipengaruhi oleh dimensi ekonomi, fisik, dan sosial, dengan pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam mendorong kemajuan pembangunan nasional maupun daerah di Indonesia (Arsyad, 2016; Sjafrizal, 2018). Perekonomian yang berkembang optimal dapat meningkatkan kondisi wilayah di sektor publik dan privat, dengan tujuan agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk golongan bawah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kebijakan pemerintah (Imelda, 2013; Rohmah & Fitrianto, 2024).

Pemerintah daerah sesungguhnya telah diberikan kewenangan yang lebih luas oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan pembangunan ekonomi, seiring dengan statusnya sebagai daerah otonom (UU Nomor 23, 2014). Pemerintah daerah perlu melakukan kajian aktif dan sistematis terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan wilayah

yang efektif, tercermin dari peningkatan pendapatan masyarakat dan nilai tambah (*added value*) yang berkelanjutan (Alwi et al., 2020; Meilena & Wahed, 2023; Tarigan, 2018). Wilayah dapat dipahami sebagai ruang dengan kesatuan geografis yang terhubung oleh unsur-unsur, di mana sistem maupun batasnya ditentukan oleh faktor fungsional maupun administratif (UU Nomor 26, 2007). Pemahaman tentang wilayah pada dasarnya melibatkan interaksi antara manusia dan sumber daya lainnya dalam suatu unit geografis tertentu, di mana pertumbuhan ekonomi wilayah umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keunggulan demografis, kekayaan sumber daya alam, serta aspek spasial atau karakteristik kewilayahan (Fudhail et al., 2021; Imelda, 2013; Silviana, 2021). Adapun faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti ketersediaan fasilitas barang modal, pertumbuhan populasi, luas lahan, dan kualitas teknologi, dapat menyebabkan disparitas pembangunan antar daerah, yang pada akhirnya menghasilkan ketimpangan ekonomi (John Glasson dalam Ghalib, 2005; Fudhail et al., 2021; Rohmah & Fitrianto, 2024).

Ketimpangan ekonomi adalah fenomena umum dalam pembangunan yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diatasi melalui percepatan pengembangan wilayah, salah satunya dengan penetapan pusat-pusat pertumbuhan (MacAndrews & Amal, 2000; Nainggolan, 2013; Saputra & Riyanto, 2023; Sjafrizal, 2018; Tampubolon & Budiassa, 2022). Pusat pertumbuhan ekonomi (*Growth Pole*) adalah pendekatan strategis yang dirancang untuk mempercepat proses pembangunan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan wilayah, di mana fokus pertumbuhan ekonomi pada wilayah dengan potensi dan fasilitas memadai dapat mempercepat kemajuan dan mendorong masyarakat mencari peluang hidup yang lebih baik (Alwi et al., 2020; Nurlina & Ginting, 2018; Saputra & Riyanto, 2023). Pemetaan pusat pertumbuhan harus diimbangi dengan distribusi manfaat melalui efek *trickle down* dan *spread* untuk merangsang pertumbuhan di daerah tertinggal tanpa mengurangi sumber daya wilayah maju, sehingga keberhasilan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perkembangan wilayah dan kemajuan daerah sekitarnya (Amelia & Prabowo, 2022; Fudhail et al., 2021; Meo et al., 2024; Purnomo et al., 2023).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan bagian integral dari NKRI dengan status keistimewaan yang diatur oleh perundang-undangan, memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan bangsa dan hak untuk mengelola serta mengembangkan perekonomiannya sesuai potensi dan kebutuhan daerah. Berdasarkan Grafik 1, setelah kontraksi -2,67% pada 2020 akibat pandemi COVID-19, perekonomian DIY mengalami pemulihan signifikan dengan pertumbuhan 5,58% pada 2021, mencerminkan membaiknya sektor ekonomi seiring pelonggaran pembatasan dan adaptasi terhadap pandemi. Namun, laju pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,15% pada 2022 dan 5,07% pada 2023.

Grafik 1.
Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Provinsi DIY Tahun 2020-2023



Sumber: BPS DIY (2024)

Kontribusi sektor terhadap PDRB mencerminkan kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB di suatu wilayah. Berdasarkan data BPS DIY (2024) sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi DIY pada tahun 2023 adalah Industri Pengolahan (11,82%), diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (10,23%), serta Akomodasi dan Makan Minum (10,18%). Sektor lainnya, seperti Informasi dan Komunikasi (10,06%) dan Konstruksi (9,43%), juga memberikan kontribusi signifikan. Pengelolaan efektif terhadap tujuh belas sektor ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang dapat mendukung pengentasan kemiskinan dan mengurangi disparitas. Persentase penduduk miskin mencerminkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang ditentukan berdasarkan standar kebutuhan dasar minimum untuk kesejahteraan. Berdasarkan Tabel 1, pada 2023, Provinsi DIY memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa-Bali, yaitu 11,04%, melebihi rata-rata nasional 9,36%, yang menunjukkan tantangan besar dalam mengurangi kemiskinan dan memerlukan kebijakan berkelanjutan untuk memutus lingkaran kemiskinan (*poverty trap*).

Tabel 1.
Data Perbandingan Presentase Penduduk Miskin dan Gini Ratio Wilayah Regional Jawa-Bali dan Indonesia (Nasional) Tahun 2023

WILAYAH	PRESENTASE PENDUDUK MISKIN (%)	Gini Ratio
DKI Jakarta	4,44	0,431
Jawa Barat	0,62	0,425
Jawa Tengah	10,7	0,369
DI Yogyakarta	11,04	0,449
Jawa Timur	10,35	0,387
Banten	6,17	0,368
Bali	4,25	0,362
Indonesia (Nasional)	9,36	0,388

Sumber: (BPS, 2024)

Indeks Gini suatu wilayah menggambarkan tingkat disparitas pendapatan. Berdasarkan Tabel 1, Indeks Gini Provinsi DIY pada 2023 tercatat 0,449, tertinggi di Jawa-Bali, mencerminkan ketimpangan pendapatan yang signifikan dan melebihi rata-rata nasional 0,388, sehingga memerlukan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat untuk merumuskan solusi efektif.

Berdasarkan tiga indikator ekonomi makro, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kabupaten/kota potensial sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan menganalisis interaksi spasial antarwilayah untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan penyelarasan disparitas pembangunan. Adapun aspek pusat pertumbuhan ekonomi dan interaksi spasial antarwilayah pernah dikaji dalam penelitian sebelumnya. Optari (2021) mengidentifikasi pusat pertumbuhan di Kabupaten Asahan melalui analisis gravitasi dan ArcGIS. Tuar et al., (2021) meneliti fasilitas sosial-ekonomi di Kota Tomohon dengan analisis skalogram dan gravitasi. Rohmah & Fitrianto (2024) mengkaji pusat pertumbuhan dan ketimpangan di Kabupaten Sidoarjo menggunakan analisis skalogram dan indeks sentralitas. Imelda (2013) menyelidiki pusat pertumbuhan di Kota Palembang melalui analisis skalogram. Adapun Nurlina & Ginting (2018) mengidentifikasi pusat pertumbuhan di Provinsi Aceh dengan analisis skalogram untuk menelaah interaksi antarwilayah.

Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan potensi signifikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti letak geografis yang strategis, luas wilayah, dan ketersediaan sumber daya alam. Pusat pertumbuhan dipandang sebagai elemen dinamis dalam struktur spasial ekonomi, yang relevansi dan fungsinya tidak bergantung pada sistem ekonomi yang dianut, baik itu kapitalis, terencana terpusat, maupun campuran (Parr, 1973). Penelitian ini berjudul "*Penentuan Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Analisis Interaksi Spasial Antarwilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*" bertujuan untuk: (a) mengidentifikasi pusat pertumbuhan ekonomi, (b) menganalisis interaksi spasial antarwilayah, (c) menentukan posisi dan sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY, serta (d) merumuskan strategi untuk pengentasan kemiskinan dan penyelarasan disparitas ekonomi antarwilayah. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan pembangunan berbasis analisis spasial, pengkajian sektor unggulan, pemahaman hubungan spasial antarwilayah, dan strategi pengentasan kemiskinan. Namun, penelitian ini terbatas oleh faktor-faktor non-ekonomi, seperti sosial, politik, budaya, dan partisipasi masyarakat, yang sulit dimasukkan dalam model analitis, sehingga penerapan teori dalam konteks praktis mungkin tidak sepenuhnya aplikatif, dan penelitian lanjutan diharapkan dapat menggali aspek-aspek tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur interaksi spasial ekonomi antara pusat-pusat pertumbuhan di Provinsi DIY dengan daerah lainnya. Penelitian ini fokus pada dampak interaksi spasial terhadap pertumbuhan ekonomi DIY, menggunakan data sekunder dari BPS atau sumber relevan berupa data *cross-sectional* dari lima kabupaten/kota di DIY pada tahun 2023, yang mencakup data demografi, fasilitas umum, dan jarak antar daerah. Perkembangan suatu wilayah yang baik meningkatkan kemampuan dalam menyediakan layanan masyarakat, seperti pendidikan, peribadatan, kesehatan,

ekonomi, pemerintahan, keamanan, komunikasi, dan transportasi, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengukur kemajuan wilayah. Adapun rincian kelompok fasilitas tersebut, sebagai berikut:

- a. Fasilitas pendidikan sebanyak 11 jenis: TK; RA; SD; MI; SMP; MTS; SMA; MA; SMK; Perguruan Tinggi (PT); serta Perguruan Tinggi Dibawah Kemenag (PT Kemenag).
- b. Fasilitas peribadatan sebanyak 12 jenis: Masjid; Mushola; Gereja Protesten; Rumah Kebaktian; Gereja Paroki; Stasi; Kapel; Pura; Sanggar; Vihara; Cetya; serta Klenteng.
- c. Fasilitas kesehatan sebanyak 9 jenis: RS Umum; RS Khusus; Rumah Bersalin; Puskesmas; Puskesmas Pembantu; Klinik Pratama; Posyandu; Klinik Keluarga Berencana (KKB); serta Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD).
- d. Fasilitas ekonomi/keuangan sebanyak 14 jenis: Bank Perkreditan Rakyat (BPR); Bank Swasta; Bank Umum; Koperasi Pasar (KOPPAS); Pasar Tradisional; Swalayan; Warung Kelontong; Perusahaan Besar dan Sedang; Perusahaan Mikro dan Kecil; Koperasi Unit Desa (KUD); Koperasi Karyawan (KOPKAR); Koperasi Wanita (KOPWAN); Koperasi Pegawai republik Indonesia (KPRI); serta Koperasi Lainnya.
- e. Fasilitas pemerintahan, keamanan, dan komunikasi sebanyak 4 jenis: Kantor Pemerintahan; Koramil, Polsek, dan Kantor Pos
- f. Fasilitas transportasi dan pendukung lainnya sebanyak 6 jenis: Stasiun Kereta Api; Bandara; Terminal; Hotel; Restoran; serta Objek Wisata.

Ketersediaan fasilitas yang memadai dapat mempengaruhi kinerja perekonomian suatu wilayah. Jumlah fasilitas yang tersedia mempengaruhi kinerja ekonomi, di mana semakin banyak fasilitas, semakin efektif pertumbuhannya, terutama dengan peningkatan populasi demografi (Edinita et al., 2020; N. A. Putra, 2015; Rohmah & Fitrianto, 2024). Penelitian ini mengkaji ketersediaan fasilitas di lima kabupaten/kota di Provinsi DIY: Bantul, Sleman, Yogyakarta, Gunungkidul, dan Kulonprogo. Alat analisis yang digunakan meliputi Skalogram, Indeks Sentralitas, dan Model Gravitasi untuk mengidentifikasi pusat pertumbuhan ekonomi dan interaksi antar wilayah. Tipologi Klassen digunakan untuk menentukan posisi perekonomian di tiap kabupaten, sementara analisis *Location Quotient* untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan.

Metode skalogram digunakan untuk mengidentifikasi pusat pelayanan berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas di setiap wilayah, dengan wilayah berperingkat tertinggi dianggap sebagai pusat pertumbuhan (Imelda, 2013; Putri, 2024). Fasilitas pelayanan mengacu pada ketersediaan fasilitas di suatu wilayah. Analisis skalogram dapat dikembangkan dengan menghitung indeks sentralitas berbobot, yang mempertimbangkan jumlah, frekuensi fasilitas, dan data tambahan melalui teknik pembobotan. Indeks Sentralitas (*Centrality Index Analysis*) mengembangkan analisis skalogram dengan memperhitungkan tidak hanya jumlah fasilitas, tetapi juga frekuensi dan penyebaran fungsi tersebut di wilayah tertentu (Mutaali, 2003 dalam Fudhail et al., 2021; Astuti et al., 2024). Analisis skalogram dan indeks sentralitas mengidentifikasi wilayah dengan hierarki tinggi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, berdasarkan jumlah fasilitas dan nilai indeks sentralitas yang tinggi, sementara wilayah hinterland

memiliki jumlah dan nilai lebih rendah. Langkah-langkah analisis skalogram dan indeks sentralitas menurut (Purnomo et al., 2023) adalah:

- a. Mengurutkan wilayah berdasarkan total populasi, dari yang terbesar ke terkecil.
- b. Menyusun fasilitas berdasarkan tingkatan atau kategori yang telah ditentukan.
- c. Membentuk matriks wilayah-fasilitas untuk menunjukkan keterhubungan antara keduanya.
- d. Menandai kehadiran fasilitas dengan angka 1 (tersedia) atau 0 (tidak tersedia).
- e. Mengurutkan ulang baris dan kolom berdasarkan jumlah fasilitas terbanyak.
- f. Menghitung indeks sentralitas dengan menganalisis kolom fasilitas dan menyusun kembali matriks sesuai urutan yang telah ditetapkan.

Dimana hal tersebut dapat dihitung dengan rumus:

$$C = (x/X)$$

Keterangan:

C = Indeks sentralitas wilayah ke-i;

x = jumlah fasilitas wilayah ke-i

X = Jumlah total fasilitas disemua wilayah

- g. Langkah terakhir analisis skalogram adalah menetapkan peringkat wilayah berdasarkan nilai keberadaan fasilitas, di mana semakin tinggi nilai, semakin tinggi pula posisi hierarki wilayah.

Model Gravitasi (Analisis Interaksi) digunakan untuk memprediksi daya tarik suatu lokasi terhadap wilayah sekitarnya. Semakin tinggi nilai interaksi, semakin kuat hubungan wilayah tersebut dengan hinterland, yang menunjukkan potensi pengembangan ekonomi yang lebih besar (Adhitya et al., 2021; Neysa et al., 2024; Tarigan, 2006). Adapun rumus mengenai model gravitasi sebagai berikut:

Keterangan :

A_{ij} = Besarnya interaksi wilayah i dengan wilayah j

k = Sebuah bilangan konstanta berdasarkan pengalaman

P_i = Jumlah penduduk di wilayah i, dalam ribuan jiwa

P_j = Jumlah penduduk di wilayah j, dalam ribuan jiwa

d_{ij} = Jarak dari wilayah i dengan wilayah j, dalam km

b = Pangkat dari d_{ij} sebagai parameter elastisitas jarak (biasanya b=2 untuk mencerminkan pola dasar gravitasi, tetapi dapat bervariasi tergantung konteks)

$$A_{ij} = k \cdot \frac{P_i \cdot P_j}{d_{ij}^b}$$

Analisis Tipologi Klassen menggambarkan posisi pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terkait perekonomian tingkat yang lebih tinggi, dengan menggunakan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi sebagai alat analisis (Salmah et al., 2020). Menurut Kuncoro (1997) wilayah dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kuadran: Daerah Maju dan Cepat Tumbuh (PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari wilayah acuan); Daerah Maju tapi Tertekan (PDRB per kapita lebih tinggi, tapi laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah); Daerah Berkembang Cepat (PDRB per kapita lebih rendah, namun laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi); dan Daerah Relatif Tertinggal (PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan wilayah acuan). Klasifikasi ini didasarkan pada rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, apabila dibuat matrik maka dapat dilukiskan dalam Tabel 2. sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.
Tabel Matrik Tipologi Wilayah

PDRB Per Kapita (x) Pertumbuhan Ekonomi(Δx)	$x_i \leq x$	$x_i \geq x$
$\Delta x_i \geq \Delta x$	Daerah Berkembang Cepat (Kuadran III)	Daerah Maju DanCepat Tumbuh (Kuadran I)
$\Delta x_i \leq \Delta x$	Daerah Relatif Tertinggal (Kuadran IV)	Daerah Maju Tapi Tertekan (Kuadran II)

Keterangan:

x_i = PDRB Per Kapita di salah satu daerah/wilayah

x = PDRB Per Kapita di daerah/wilayah acuan

Δ = Tingkat Pertumbuhan

Δx_i = Pertumbuhan PDRB di salah satu daerah/wilayah

Δx = Pertumbuhan PDRB di daerah/wilayah acuan

$$\Delta x_i = \frac{x_{it} - x_{it-1}}{x_{it-1}} \times 100\%$$

Sumber : Kuncoro (1997)

Metode Location Quotient (LQ) menurut Tarigan (2018) digunakan untuk membandingkan kontribusi sektor di suatu wilayah dengan sektor yang sama di wilayah yang lebih luas. Tujuan analisis ini adalah mengidentifikasi sektor unggulan. Jika nilai $LQ > 1$, sektor tersebut adalah sektor basis, menunjukkan keunggulan komparatif. Jika $LQ < 1$, sektor tersebut adalah sektor non-basis, yang mengindikasikan perlunya impor (Tambun et al., 2024).

$$LQ = \frac{\left(\frac{PDRB_{ik}}{PDRB_{it}} \right)}{\left(\frac{PDRB_{nk}}{PDRB_{nt}} \right)}$$

Keterangan :

- $PDRB_{ik}$ = PDRB sektor k di wilayah i (misalnya sektor pertanian dll)

- $PDRB_{it}$ = Total PDRB di wilayah i (jumlah PDRB seluruh sektor di wilayah tersebut).

- $PDRB_{nk}$ = PDRB sektor k di wilayah yang lebih luas (misalnya provinsi atau nasional).

- $PDRB_{nt}$ = Total PDRB di wilayah yang lebih luas (jumlah PDRB seluruh sektor di tingkat provinsi atau nasional).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui dua pendekatan: sektoral, yang fokus pada pengembangan sektor ekonomi tertentu, dan regional, yang menekankan pemanfaatan ruang serta interaksi kegiatan antar wilayah. Pendekatan sektoral mengelompokkan kegiatan berdasarkan sektor, sedangkan pendekatan regional mengutamakan pengembangan daerah dan penentuan sektor yang sesuai. Keduanya bertujuan menciptakan efisiensi melalui pemanfaatan ruang yang optimal. Pendekatan regional juga memperhatikan konsentrasi kegiatan, fasilitas yang diperlukan, dan jaringan penghubung antar kegiatan.

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) adalah wilayah yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat integrasi ekonomi di sekitarnya, yang berdampak pada perkembangan ekonomi nasional (Dobrescu&Dobre, 2014 dalam Irsyad & Syahnur, 2018) Menurut Tarigan (2018) pusat pertumbuhan adalah area yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya.

Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah konsentrasi industri atau usaha yang merangsang ekonomi, baik di dalam maupun luar wilayahnya, sementara secara geografis, memiliki fasilitas yang menarik usaha untuk berkembang meskipun tanpa interaksi langsung antar usaha. Pusat pertumbuhan berfungsi sebagai motor ekonomi yang memperkuat wilayahnya dan menyebarkan *efek spillover* ke daerah sekitar melalui lapangan kerja, industri, dan fasilitas. Perroux (1955) dalam Irsyad & Syahnur (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terpusat di lokasi tertentu sebagai pusat pertumbuhan yang memengaruhi wilayah sekitarnya dan menarik potensinya, berdampak pada kemiskinan dan disparitas. Penelitian ini menganalisis pusat pertumbuhan ekonomi melalui Skalogram, Indeks Sentralitas, *Location Quotient*, analisis Gravitasi, Tipologi Klassen, serta strategi pengentasan kemiskinan dan penyelarasan disparitas ekonomi antarwilayah di Kabupaten/Kota Se-Provinsi DIY.

Skalogram menggambarkan hubungan antarwilayah berdasarkan jumlah fasilitas, di mana wilayah dengan fasilitas lebih banyak menempati posisi lebih tinggi. Hasil Analisis Skalogram sesuai dengan Tabel 3 menunjukkan bahwa menunjukkan Kota Yogyakarta memiliki fasilitas terbanyak (56 jenis), diikuti Sleman (51), Bantul (50), Gunungkidul (49), dan Kulonprogo (48). Yogyakarta berada di Hierarki I, Sleman di Hierarki II, Bantul dan Gunungkidul di Hierarki III, serta Kulonprogo di Hierarki IV.

Tabel 3.

Hasil Analisis Skalogram serta Indeks Sentralitas

No	Kabupaten/ Kota	Hasil Analisis Skalogram		Hasil Analisis Indeks Sentralitas	
		Jumlah Jenis Fungsi	Kelompok Hierarki	Indeks Sentralitas	Kelompok Hierarki
1	Yogyakarta	56	I	0,220	I
2	Sleman	51	II	0,201	II
3	Bantul	50	III	0,197	III
4	Gunungkidul	49	III	0,193	III
5	Kulonprogo	48	IV	0,189	IV

Sumber: Data Diolah, 2024

Indeks sentralitas (*Centrality Indeks Analysis*) digunakan untuk mengukur peran suatu wilayah (kabupaten/kota) dibandingkan dengan wilayah lain (provinsi) dalam hal fasilitas, dengan total 254 fasilitas yang dihitung (C) dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY. Berdasarkan tabel 3, perhitungan indeks sentralitas menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki indeks tertinggi sebesar 0,220, diikuti oleh Kabupaten Sleman (0,201), Bantul (0,197), Gunungkidul (0,193), dan Kulonprogo (0,189). Dengan demikian, Yogyakarta termasuk Hierarki I, Sleman Hierarki II, Bantul dan Gunungkidul Hierarki III, serta Kulonprogo Hierarki IV.

Interaksi spasial menggambarkan dinamika wilayah akibat aktivitas penduduk, dan dalam penelitian ini, analisis gravitasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua wilayah berdasarkan daya tarik masing-masing. Provinsi DIY mempunyai potensi kependudukan yang cukup besar yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Menurut BPS DIY (2024) jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 375.699 jiwa; Kabupaten Bantul sebanyak 985.770 jiwa; Kabupaten Kulonprogo

sebanyak 436.395 jiwa; Kabupaten Gunungkidul sebanyak 747.161 jiwa; serta Kabupaten Sleman sebanyak 1.125.804 jiwa. Potensi kependudukan tersebut tentu mempengaruhi daya tarik/interaksi antar wilayah. Merujuk pada Tabel 4, dapat diketahui bahwa hasil perhitungan Model Gravitasi (Analisis Interaksi) menunjukkan bahwa nilai tertinggi yaitu Bantul-Yogyakarta sebesar 3.181.238; Yogyakarta-Sleman sebesar 2.355.671; serta Bantul-Sleman sebesar 1.734.362. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul memiliki interaksi gravitasi yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta adalah pusat pertumbuhan utama, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Tabel 4.

Hasil Analisis Interaksi (Model Gravitasi)

No	Wilayah i	Wilayah j	Jarak Wilayah i ke j (KM)	Besarnya Interaksi (gravitasi)	Rangking
1	Bantul	Yogyakarta	10,8	3.181.238	1
2	Bantul	Sleman	25,3	1.734.362	3
3	Bantul	Gunungkidul	40,2	455.050	6
4	Bantul	Kulonprogo	26,5	613.461	4
5	Yogyakarta	Sleman	13,4	2.355.671	2
6	Yogyakarta	Kulonprogo	32,4	155.827	9
7	Yogyakarta	Gunungkidul	22,2	568.536	5
8	Sleman	Gunungkidul	52,2	308.717	8
9	Sleman	Kulonprogo	37,1	357.039	7
10	Gunungkidul	Kulonprogo	60,1	9.034	10

Sumber: Data Diolah, 2024

Analisis selanjutnya yaitu analisis tipologi klasen. Analisis tipologi klasen ini bertujuan untuk menafsirkan corak perekonomian atau posisi perekonomian wilayah di Provinsi DIY. Hasil analisis tipologi klasen sebagaimana Tabel 5 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta berada dalam Daerah Maju dan Cepat Tumbuh (Kuadran I), Kabupaten Kulonprogo dan Sleman dalam Daerah Berkembang Cepat (Kuadran III), sementara Kabupaten Bantul dan Gunungkidul termasuk dalam Daerah Relatif Tertinggal (Kuadran IV). Analisis ini berguna untuk merencanakan pembangunan yang efektif, mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan wilayah, serta mengidentifikasi ketimpangan antarwilayah untuk mengurangi kesenjangan. Metode ini juga memudahkan evaluasi perkembangan wilayah dan membantu menentukan prioritas investasi dalam pembangunan.

Tabel 5.
Hasil Analisis Tipologi Klassen

No	Kab/Kota	PDRB Perkapita		Laju Pertumbuhan Ekonomi		Kuadran	Keterangan
		Jumlah (Ribuan Rp)	Posisi $x_i \square x$	Jumlah (%)	Posisi $\square x_i \square \square x$		
1	Kulonprogo	22.462	$x_i \square x$	5,65	$\square x_i \square \square x$	III	Daerah Berkembang Cepat
2	Bantul	21.657	$x_i \square x$	5,06	$\square x_i \square \square x$	IV	Daerah Relatif Tertinggal
3	Gunungkidul	20.971	$x_i \square x$	5,04	$\square x_i \square \square x$	IV	Daerah Relatif Tertinggal
4	Sleman	34.139	$x_i \square x$	5,09	$\square x_i \square \square x$	III	Daerah Berkembang Cepat
5	Yogyakarta	83.521	$x_i \square x$	5,08	$\square x_i \square \square x$	I	Daerah Maju Dan Cepat Tumbuh
Prov DIY		48.358		5,07			

Sumber: Data Diolah, 2024

Analisis *Location Quotient (LQ)* menunjukkan sektor basis di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Pada Tahun 2023 sebagai berikut: Kabupaten Kulonprogo memiliki 6 sektor basis, Kabupaten Bantul 5 sektor basis, Kabupaten Gunungkidul 7 sektor basis, Kabupaten Sleman 6 sektor basis, dan Kota Yogyakarta 11 sektor basis. Sektor basis berperan dominan dalam mendukung PDRB dan pertumbuhan ekonomi, adapun rinciannya sebagaimana terpapar pada Tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Analisis *Location Quotient (LQ)*

No	Kabupaten / Kota	Sektor															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kulonprogo	B	B	N	N	B	B	B	B	N	N	N	N	N	N	N	N
2	Bantul	B	B	B	B	.B	.B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Gunungkidul	B	B	N	N	B	.B	B	B	N	N	N	N	N	N	N	
4	Sleman	B	B	B	B	.B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
5	Yogyakarta	N	N			N	N	N								N	

Keterangan : 9 : Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

B : Basis Komunikasi	10 : Informasi dan
NB : Non Basis Keuangan dan Asuransi	11 : Jasa
1 : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12 : Real Estat
2 : Pertambangan dan Penggalian Perusahaan	13 : Jasa
3 : Industri Pengolahan Pemerintahan, Pertahanan dan	14: Administrasi
4 : Pengadaan Listrik dan Gas Sosial Wajib	Jaminan
5 : Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Pendidikan	15: Jasa
6 : Konstruksi Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16: Jasa
7 : Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	
8 : Transportasi dan Pergudangan lainnya	17: Jasa

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode analisis *Skalogram*, Indeks Sentralitas, serta analisis interaksi (model gravitasi), maka dapat disimpulkan bahwa Pusat Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Pole*) Provinsi DIY Tahun 2023 terletak di Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dimaknai bahwa Kota Yogyakarta merupakan area yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di wilayah sekitarnya maupun secara nasional, melalui konsentrasi industri/jasa atau usaha sektor lain yang tergolong sektor basis dapat merangsang perkembangan ekonomi. Adapun menurut hasil analisis *LQ*, sektor basis di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ada 11 sektor yang meliputi Industri Pengolahan; dan lain sebagainya. Pengembangan kawasan ekonomi dimulai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, berfokus pada wilayah dengan potensi unggulan seperti sumber daya alam, demografi, budaya, dan infrastruktur (Ariansyah et al., 2024; Iskandar, 2021; O. . Putra et al., 2023; Riyadi & Bratakusumah, 2003). Hal ini untuk mencapai efisiensi pengembangan kewilayahan.

Secara fundamental, isu dan kajian kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi berbagai negara di dunia, terkait pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan antarnegara (Anwar, 2022). Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dirumuskan strategi dalam pengentasan kemiskinan dan penyelarasan disparitas antar kabupaten/kota melalui pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi (*growth pole*) yang berfokus pada Kota Yogyakarta sebagai pusatnya, serta memanfaatkan hubungan dengan wilayah sekitarnya (*hinterland*). Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah DIY, dengan memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di Kota Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Kota Yogyakarta dipilih sebagai pusat pertumbuhan karena memiliki berbagai keunggulan, seperti infrastruktur yang lebih berkembang serta potensi sektor

pariwisata, jasa pendidikan, dan teknologi yang cukup potensial. Hal ini tentu selaras dengan hasil Indeks Sentralitas, analisis *Skalogram*, dan analisis interaksi (model gravitasi) yang telah dilaksanakan melalui penelitian ini. Sebagai pusat pertumbuhan, Kota Yogyakarta diharapkan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, seperti Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Melalui penguatan hubungan ekonomi dan integrasi antar wilayah, Kota Yogyakarta dapat menimbulkan efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) dan efek sebar (*spread effect*) bagi wilayah *hinterland*nya, Dimana yang pada akhirnya dapat memberikan dampak dalam pengentasan kemiskinan dan penyelarasan disparitas. Adapun strategi yang dapat dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi DIY bersama 5 Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi DIY dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyelarasan disparitas yaitu meliputi: Pengembangan Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole*) yang Terpadu; Penguatan Konektivitas Antar Wilayah; Pemberdayaan Sektor-sektor Basis; Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi; Inovasi dan Pengembangan Teknologi; Peningkatan Investasi dan Kemitraan Swasta-Pemerintah; dan pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan.

SIMPULAN

Analisis spasial wilayah Provinsi DIY mengindikasikan bahwa Kota Yogyakarta berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yang dominan, dengan tingkat fasilitas dan indeks sentralitas yang sangat tinggi, sehingga menjadikannya pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan administratif. Sementara itu, wilayah-wilayah di sekitarnya memperlihatkan adanya ketimpangan pengembangan yang signifikan, yang menyebabkan wilayah tersebut berfungsi sebagai *hinterland* dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan infrastruktur yang memadai.

Hasil analisis menggunakan pendekatan metode gravitasi menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki daya tarik ekonomi yang sangat kuat, yang berpotensi untuk mendorong pemerataan ekonomi jika pengembangan kawasan aglomerasi di sekitar kota tersebut dapat diperluas dan dioptimalkan. Berdasarkan klasifikasi tipologi Klassen, Kota Yogyakarta masuk dalam kategori wilayah maju, sedangkan Kabupaten Kulonprogo dan Sleman menunjukkan laju perkembangan yang cukup pesat, sedangkan Kabupaten Bantul dan Gunungkidul mengalami keterlambatan dalam hal pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor unggulan. Untuk mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah, diperlukan strategi pembangunan ekonomi yang terintegrasi dan berbasis pada pengembangan potensi daerah, antara lain melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan (*growth poles*), penguatan konektivitas antarwilayah, pemberdayaan sektor-sektor basis unggulan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang dapat mendukung tercapainya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi di seluruh wilayah Provinsi DIY.

DAFTAR PUSTAKA

Adhitya, B., Winarto, H., & Prabawa, A. (2021). Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi

- dan Interaksi Spasial Di Provinsi Jawa Tengah. *Majalah Ilmu Manajemen & Bisnis (MIMB)*, 9–16.
- Alwi, M., Karismawan, P., & Paranata, A. (2020). Identifikasi interaksi ekonomi sektoral antara Kota Mataram sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan kabupaten yang ada di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Lastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 20–29.
- Amelia, R., & Prabowo, P. . (2022). Penentuan Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Identifikasi Interaksi Ekonomi Sektoral Pada Kawasan Segitiga Emas Tahun 2016-2020. *E-QUIN: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 494–501.
- Anwar, A. (2022). Spatial Analysis of Regional in Central Jawa Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP) Undip*, 5(1), 36–55.
- Ariansyah, M., Jordan, N. A., Hidayat, A., & Pratomo, R. A. (2024). Pemilihan Pusat Pertumbuhan Baru Pada Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara: Studi Kasus Kecamatan Penajam. *Journal of Infrastrukture Policy and Management*, 7(2), 97–102.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Astuti, M. D., Dasrizal, & Despica R. (2024). Analisis Pusat Pertumbuhan Wilayah Di Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Perhitungan Hierarki dengan Analisis Scalogram. *Journal on Education*, 7(1), 4496–4504.
- BPS. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. <https://www.bps.go.id>
- BPS DIY. (2024). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2024*. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/8bf08007fc346b9f836ca663/provinsi-daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2024.html>
- Devi, I. M., Yunitasari, D., Priyono, T. H., Mahardiyanto, A., Amijaya, R. N. F., & Somaji, R. P. (2023). Penentuan Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi Spasial di Wilayah Kabupaten Blitar. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2), 98–107.
- Edinita, D. C., Sari, D. ., Qomala, I., & Muliana, R. (2020). Analisis Pusat Pelayanan Kegiatan Minapolitan. *Journal Online Institut Teknologi Kalimantan*, 1–13.
- Emalia, Z., & Farida, I. (2018). Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Interaksi Spasial di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1). <https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.4100>
- Fudhail, I., Sambodo, H., & Purnomo, S. D. (2021). Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Analisis Interaksi Spasial Perekonomian di Provinsi Jawa Timur. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.217>
- Ghalib, R. (2005). *Ekonomi Regional*. Pustaka Ramadhan.
- Gulo, Y. (2015). Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pendukungnya dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Nias. *Widyariset*, 18(1), 37–38.
- Imelda. (2013). Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Daerah Hinterland Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 54–66. <https://doi.org/10.29259/jep.v11i1.4913>
- Irsyad, M., & Syahnur, S. (2018). Interaksi Spasial Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 3(4), 475–483.
- Iskandar, S. (2021). *Kawasan Ekonomi: Keberadaan, Peluang, dan Tantangan*. PT Kompas Media Nusantara.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN.
- MacAndrews, C., & Amal, I. (2000). *Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan*. Rajawali Pers.
- Meilena, E., & Wahed, M. (2023). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangkalan. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen,*

- Dan Akuntansi*), 9(4), 1284–1297.
- Meo, M. L., Ballo, F. W., & Tiwu, M. I. H. (2024). Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak (EKSAP)*, 1(3), 22–43.
- Nainggolan, P. T. P. (2013). Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(12), 15–26.
- Neysa, P. P., Hamidi, W., & Desweni, S. P. (2024). Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Di Kabupaten Siak. *Journal of Economics, Business and Management Issues*, 2(2), 107–122.
- Nurlina, & Ginting, A. R. B. (2018). Analisis Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pendukungnya dalam Pengembangan Wilayah Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 60–69.
- Optari, L. . (2021). Analisis Interaksi Spasial Terhadap Penentuan Pusat Pertumbuhan Pada Pengembangan Wilayah Kabupaten Asahan. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Paper STIE AAS*.
- Parr, J. B. (1973). Growth Poles, Regional Development, and Central Place Theory. *Papers in Regional Science*, 31(1), 173–212. <https://doi.org/10.1111/j.1435-5597.1973.tb00893.x>
- Purnomo, S. ., Wahyuni, Y. ., Danuta, K. ., Jati, D., & Achadi, A. (2023). Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi Spasial: Studi Empiris Di Provinsi Sumatera selatan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(07), 1294–1305.
- Putra, N. A. (2015). *Penentuan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pengembangan Wilayah Di Eks. Karesidenan Besuki*. Universitas Jember.
- Putra, O. ., As'ad, & Revolina, E. (2023). Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Bengkulu. *Journal Social and Policy Issues*, 3(3), 140–144.
- Putri, A. R. (2024). Analysis of Regional Growth Center and Hinterland In Bantul Regency. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan UAD*, 14(2), 224–236.
- Rahajeng, A. (2016). *Modul Praktikum Perencanaan Pembangunan Daerah*. Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. . (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rohmah, N. A., & Fitrianto, A. R. (2024). Analisis Interaksi Spasial Antarwilayah di Kabupaten Sidoarjo: Identifikasi Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Ketimpangan. *Desa-Kota*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v6i1.76207.1-13>
- Salmah, E., Sahri, & Astuti E. (2020). Analisis Penentuan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Di Kabupaten Lombok Barat. *ELASTISITAS: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 61–70.
- Saputra, M. ., & Riyanto, W. H. (2023). Identifikasi Pusat Pertumbuhan Pada Tingkat Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 7(04), 516–530.
- Silviana, E. (2021). *Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tulungagung*. Universitas Jember.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya Di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Tambun, L. H., Andiny, P., Chaira, T. M. I., & Asnidar. (2024). Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(3), 547–560.
- Tampubolon, C. N., & Budiasa, I. W. (2022). Analisis Penentuan Pusat Pertumbuhan

- Ekonomi dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*, 11(1), 126-135.
- Tarigan, R. (2006). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. PT Bumi Aksara.
- Tarigan, R. (2018). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. PT Bumi Aksara.
- Tuar, I. ., Sela, R. L. ., & Lakat, R. S. . (2021). Kajian Pusat-Pusat Pelayanan Kota Tomohon Berdasarkan Hirarki. *Jurnal Spasial*, 8(1), 133-142.
- UU Nomor 23. (2014). *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. <https://jdih.bappenas.go.id>
- UU Nomor 25. (2004). *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/60>
- UU Nomor 26. (2007). *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*.
- Yuliarni, A., & Astuti, P. (2024). Penentuan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Komoditas Unggulan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. *Jurnal MEDIAN Arsitektur Dan Planologi*, 14(02), 48-55. <https://doi.org/10.58839/jmap.v14i02.1407>